



LAPORAN KINERJA INSTANSI PERANGKAT DAERAH (LKJIP) TAHUN 2021

DINAS KESEHATAN KOTA BLITAR
Tahun 2022

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas berkat dan rahmat-Nya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kesehatan Kota Blitar Tahun 2020 dapat disusun. Dokumen ini merupakan wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan Kota Blitar serta bentuk akuntabilitas pencapaian kinerja Dinas Kesehatan Kota Blitar.

Laporan ini berupaya menggambarkan berbagai capaian kinerja yang dapat diraih oleh Dinas Kesehatan Kota Blitar selama Tahun 2021 dengan membandingkannya terhadap target kinerja yang telah ditetapkan untuk Tahun 2021. Berbagai kebijakan dan upaya telah dilaksanakan dalam rangka mewujudkan tujuan Pembangunan Kesehatan di Kota Blitar, yaitu **“Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat”**, dan mendukung Visi Pemerintah Kota Blitar, yaitu **“Masyarakat Kota Blitar Semakin Sejahtera: Religius, Cerdas, Sehat dengan Semangat Rukun Agawe Santoso”** dengan berupaya mewujudkan Misi ke-4 Pembangunan Kota Blitar yaitu **“Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Keren, Berdaya Saing, Sehat Jasmani - Rohani, Cerdas, dan Berkarakter”**.

Kami sampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi dalam penyusunan laporan ini. Melalui penyusunan laporan ini kami sangat mengharapkan adanya masukan umpan balik yang akan berguna dalam proses perbaikan kinerja Dinas Kesehatan Kota Blitar di masa mendatang. Masukan dan saran perbaikan sangat kami harapkan guna penyempurnaan di waktu yang akan datang.

Blitar, Januari 2022

KEPALA DINAS KESEHATAN
KOTA BLITAR

Dr. DHANNA SITI AWAN, M.MKes.
Pembina
NIP. 19600305 200112 1 003

RINGKASAN EKSEKUTIF

Berdasarkan Peraturan Walikota Kota Blitar Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan mempunyai tugas pokok membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan.

Tujuan yang hendak dicapai oleh Dinas Kesehatan Kota Blitar sesuai dengan Rencana Strategis 2016 -2021 adalah ***“Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat”***. Untuk mewujudkan tujuan yang hendak dicapai tersebut, maka Dinas Kesehatan Kota Blitar menetapkan sasaran dalam Renstra tahun 2016 – 2021, ***“Meningkatnya akses pelayanan kesehatan”*** dan ***“Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan masyarakat”***.

Perumusan keberhasilan pencapaian kinerja jika indikator keberhasilannya dapat diwujudkan. Dinas Kesehatan Kota Blitar telah menetapkan 5 (lima) Indikator Kinerja Utama yang merupakan Indikator Tujuan, untuk menjadi tanggung jawab organisasi dan harus dicapai setiap tahunnya selama periode Renstra.

Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan Kota Blitar Tahun 2021 adalah:

1. Indeks Keluarga Sehat (IKS) Kota Blitar;
2. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan kesehatan;
3. Angka Kematian Ibu (AKI);
4. Angka Kematian Bayi (AKB);
5. Prevalensi Balita Stunting.

Dalam Rencana Kinerja Dinas Kesehatan Kota Blitar Tahun 2021 ditetapkan 4 (empat) program upaya strategis dan 1 (satu) program pendukung/Administrasi Umum, meliputi:

Program Upaya Strategis:

1. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat;
2. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia;
3. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman;
4. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan.

Program Pendukung (Administrasi Umum):

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

Program ditujukan untuk meningkatkan peran masing bidang, sekretariat, seksi-seksi dan sub bagian di lingkungan Dinas Kesehatan Kota Blitar dalam perumusan kebijakan Walikota demi meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat Kota Blitar, sehingga kedepan

akan terwujud peningkatan derajat masyarakat Kota Blitar yang berbasis sistem pelayanan berkualitas dan partisipatif.

Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Kota Blitar merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja berbagai program dan kegiatan yang telah dilaksanakan selama satu tahun anggaran 2021 oleh masing-masing bidang, sekretariat, seksi-seksi dan sub bagian dari dana APBD Kota Blitar. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bidang, sekretariat, seksi-seksi dan sub bagian Kota Blitar didukung dengan dana yang cukup memadai. Pada tahun 2021 dengan jumlah anggaran adalah sebagai berikut:

1. Belanja Operasi	:	Rp.	96.808.665.207,00
2. Belanja Modal	:	Rp.	4.213.066.003,00
Jumlah			101.021.731.210,00

Secara keseluruhan keterkaitan dalam pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam mewujudkan tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Blitar tahun 2021 termasuk kategori 4 (empat) dengan nilai rata-rata capaian kinerja **(-46,96)%** atau **"tidak berhasil"**.

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2021	Realisasi 2021	Capaian
Meningkatkan akses pelayanan kesehatan	1. Indeks Keluarga Sehat (IKS) Kota Sehat	0,71 (skala)	0,28 (skala)	39,44%
Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat	2. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan kesehatan	BAIK	BAIK	100% / tercapai
	3. Angka Kematian Ibu (AKI)	94,50 per-100.000 kelahiran hidup	889,59 per-100.000 kelahiran hidup	(-650)%
	4. Angka Kematian Bayi (AKB)	8,08 per-1.000 kelahiran hidup	5,76 per-1.000 kelahiran hidup	128,71%
	5. Prevalensi balita stunting	10%	5,28%	147,2%
Rata-Rata Capaian Kinerja				(-46,93)%

Sedangkan akuntabilitas keuangan/kinerja keuangan sebesar **93,18%** dikategorikan **"sangat berhasil"**, masih dijumpai beberapa permasalahan dalam pelaksanaannya.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Ikhtisar Eksekutif	ii
Daftar Isi	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi	1
C. Maksud dan Tujuan	4
D. Dasar Hukum	5
E. Aspek-aspek Strategis	5
F. Isu-Isu Strategis	9
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA	10
A. Rencana Strategis	10
B. Perjanjian Kinerja Tahun 2021	11
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	15
A. Pengukuran Capaian Kinerja/Sasaran	15
1. Analisis Capaian Kinerja berdasarkan Target dan Realisasi Tahun 2021	17
2. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2020 – 2021	24
3. Perbandingan Realisasi Kinerja s.d. Akhir Periode Renstra	25
4. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Provinsi Jawa Timur (Target SPM)	26
B. Akuntabilitas Keuangan (Cost Per Outcome)	28
1. Alokasi Per-Sasaran Pembangunan	37
2. Pencapaian Kinerja dan Anggaran	38
3. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	42
C. Prestasi/Penghargaan	43
BAB IV PENUTUP	44
A. Kesimpulan	44
B. Langkah Perbaikan	45

Lampiran-Lampiran

- A. Matriks Rencana Strategis OPD Tahun 2016 – 2021
- B. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2021
- C. Perjanjian Kinerja Tahun 2021
- D. Pengukuran Kinerja Tahun 2021

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	SDM Dinas Kesehatan Kota Blitar berdasarkan Jabatan Tahun 2021	5
Tabel 1.2	Kekuatan SDM Dinas Kesehatan Kota Blitar berdasarkan Golongan Tahun 2021	6
Tabel 1.3	Jumlah Sarana Kesehatan menurut Kepemilikan Tahun 2021	7
Tabel 1.4	Anggaran Pembiayaan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kota Blitar Tahun 2021	8
Tabel 2.1	Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kesehatan Kota Blitar Tahun 2021	13
Tabel 3.1	Pencapaian Kinerja Dinas Kesehatan Kota Blitar Tahun 2021	17
Tabel 3.2	Persentase Capaian Indikator Keluarga Sehat Kota Blitar Tahun 2021	18
Tabel 3.3	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Bidang kesehatan Kota Blitar Tahun 2021	23
Tabel 3.4	Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2020 – 2021	25
Tabel 3.5	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun s.d. Akhir Periode Rentra	26
Tabel 3.6	Perbandingan Realisasi Kinerja Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan Kota Blitar Tahun 2021 dengan Realisasi Provinsi Jawa Timur	27
Tabel 3.7	Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung Tahun 2021	29
Tabel 3.8	Anggaran Belanja Langsung pada Sasaran Strategis Dibandingkan Dengan Keseluruhan Anggaran Belanja Langsung Dinas Kesehatan Kota Blitar Tahun 2021	37
Tabel 3.9	Anggaran Belanja Langsung pada Program-Program Administrasi Umum Dibandingkan Dengan Keseluruhan Anggaran Belanja Langsung Dinas Kesehatan Kota Blitar Tahun 2021	38
Tabel 3.10	Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2021	39
Tabel 3.11	Efisiensi Penggunaan Anggaran	42

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dinas Kesehatan Kota Blitar mempunyai peran membantu Walikota Blitar dalam menyelenggarakan Pemerintahan Daerah di Bidang Kesehatan.

Dinas Kesehatan Kota Blitar berperan strategis dalam mewujudkan visi Pembangunan Kota Blitar 2016-2021, yakni **“Masyarakat Kota Blitar Semakin Sejahtera: Religius, Cerdas, Sehat dengan Semangat Rukun Agawe Santoso”** dan pelaksanaan 5 (lima) misi pembangunan, khususnya misi ke-2: Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Keren, Berdaya Saing, Sehat Jasmani - Rohani, Cerdas, dan Berkarakter.

Laporan Kinerja ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Dinas Kesehatan Kota Blitar atas pelaksanaan tugas dan fungsi selama Tahun 2021 dan alat bantu dalam upaya perbaikan Dinas Kesehatan Kota Blitar secara berkesinambungan di masa yang akan datang dalam rangka pemenuhan aspek akuntabilitas.

B. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan diatur dalam Peraturan Walikota Blitar Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan. Dalam kedudukannya, tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan Kota Blitar merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang Kesehatan yang menjadi kewenangan daerah.

Dinas Kesehatan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Dinas Kesehatan mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan.

Dinas Kesehatan menjabarkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam suatu Rencana Strategis Tahun 2016 – 2021 yang didalamnya tertuang Tujuan dan Sasaran Tahunan yang diukur dengan seperangkat indikator kinerja berupa *output*

dan *outcome* beserta target tahunan yang jelas. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Dinas Kesehatan melaksanakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang Kesehatan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- b. pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang Kesehatan dan pelayanan umum di bidang Kesehatan;
- c. pengkoordinasian penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Kesehatan;
- d. penyelenggaraan dan pengelolaan administrasi dan urusan rumah tangga Dinas;
- e. penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Kesehatan dan pelayanan umum di bidang Kesehatan;
- f. penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kesehatan dan pelayanan umum di bidang kesehatan meliputi bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, kefarmasian, alat kesehatan, PKRT serta sumber daya kesehatan;
- g. pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas di bidang kesehatan meliputi bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, kefarmasian, alat kesehatan, PKRT serta sumber daya kesehatan;
- h. penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Kesehatan sesuai dengan kewenangan Daerah;
- i. penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP);
- j. pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
- k. pelaksanaan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas pelayanan;
- l. pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang kesehatan;
- m. penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan kesehatan secara berkala melalui *sub domainwebsite* Pemerintah Daerah;
- n. pelaksanaan pengendalian, pengawasan, dan pembinaan di bidang administrasi kepegawaian, kearsipan, ketetatalaksanaan, ketatausahaan, pengelolaan anggaran, perlengkapan, kehumasan dan pelaksanaan tugas dinas;
- o. pelaksanaan pengembangan kemampuan organisasi meliputi pembinaan personil, administrasi umum, ketatalaksanaan dan sarana prasarana kerja;

- p. penyelenggaraan keamanan, kebersihan, dan kenyamanan bekerja di lingkungan kantor;
- q. pembinaan dan pengawasan pengelolaan sumber pendapatan asli daerah;
- r. pelaksanaan koordinasi, monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas bidang Kesehatan; dan
- s. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan bidang tugasnya.

Untuk melaksanakan fungsi tersebut, Dinas Kesehatan Kota Blitar mempunyai kewenangan:

- a. penetapan kebijakan operasional dibidang Kesehatan;
- b. perencanaan operasional program Kesehatan;
- c. penyelenggaraan survailans epidemiologi, penyelidikan kejadian luar biasa skala kota;
- d. penyelenggaraan pengendalian penyakit menular skala kota;
- e. penyelenggaraan pengendalian penyakit tidak menular tertentu skala kota;
- f. penyelenggaraan operasional penanggulangan masalah kesehatan akibat bencana dan wabah skala kota;
- g. penyelenggaraan penyehatan lingkungan;
- h. penyelenggaraan survailans gizi buruk skala kota;
- i. penyelenggaraan penanggulangan gizi buruk skala kota;
- j. penyelenggaraan perbaikan gizi keluarga dan masyarakat;
- k. penyelenggaraan pelayanan kesehatan haji skala kota;
- l. pengelolaan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan sekunder skala kota;
- m. penyelenggaraan registrasi, akreditasi, sertifikasi sarana kesehatan sesuai peraturan perundang-undangan;
- n. pemberian rekomendasi izin sarana kesehatan tertentu sesuai peraturan perundang-undangan;
- o. pemberian izin sarana kesehatan meliputi rumah sakit pemerintah Kelas C, Kelas D, rumah sakit swasta yang setara, praktik berkelompok, klinik umum/spesialis, rumah bersalin, klinik dokter keluarga/dokter gigi keluarga, kedokteran komplementer, dan pengobatan tradisional, serta sarana penunjang yang setara sesuai peraturan perundang-undangan;
- p. pengelolaan/penyelenggaraan, jaminan pemeliharaan kesehatan sesuai kondisi lokal;

- q. penyelenggaraan jaminan pemeliharaan kesehatan nasional (Tugas Pembantuan);
- r. penyelenggaraan pemanfaatan tenaga kesehatan strategis;
- s. penyelenggaraan pendayagunaan tenaga kesehatan skala kota;
- t. fasilitasi pelatihan teknis skala kota;
- u. pemberian registrasi, akreditasi, sertifikasi tenaga kesehatan tertentu skala Kota sesuai peraturan perundang-undangan;
- v. pemberian rekomendasi izin praktik tenaga kesehatan tertentu;
- w. penyediaan dan pengelolaan obat pelayanan kesehatan dasar, alat kesehatan, reagensia dan vaksin skala kota;
- x. pengambilan sampling/contoh sediaan farmasi di lapangan;
- aa. pemeriksaan setempat sarana produksi dan distribusi sediaan farmasi;
- bb. pengawasan dan registrasi makanan minuman produksi rumah tangga;
- cc. penyelenggaraan sertifikasi alat kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) Kelas I;
- dd. pemberian rekomendasi izin apotik, toko obat;
- ee. penyelenggaraan promosi kesehatan skala kota;
- ff. pelaksanaan peningkatan pendapatan asli daerah;
- gg. penyelenggaraan, bimbingan dan pengendalian operasionalisasi bidang kesehatan;
- hh. penyelenggaraan penelitian dan pengembangan kesehatan yang mendukung perumusan kebijakan kota;
- ii. implementasi penapisan Iptek di bidang kesehatan masyarakat skala kota;
- jj. penyelenggaraan kerjasama kesehatan skala kota;
- kk. pengelolaan SIK skala kota.

C. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja Dinas Kesehatan Kota Blitar Tahun 2021, dengan tujuan:

1. mengetahui capaian kinerja Pemerintah Dinas Kesehatan Kota Blitar Tahun 2021;
2. sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Dinas Kesehatan Kota Blitar

untuk meningkatkan kinerjanya;

3. sebagai media dalam upaya menyempurnakan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) menuju pemerintahan yang bersih (*clean government*), dan untuk memenuhi tiga pilar utama tata kelola pemerintahan yang baik yaitu akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi melalui penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

D. Dasar Hukum

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Walikota Blitar Nomor 68 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

E. Aspek-Aspek Strategis

1. Aspek Sumber Daya Manusia

Jumlah SDM di Lingkungan Dinas Kesehatan Kota Blitar sampai dengan Oktober 2021 adalah sebanyak 254 orang, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1.1
SDM Dinas Kesehatan Kota Blitar berdasarkan Jabatan Tahun 2021

No.	Jabatan	Jumlah
1	2	3
1.	Eselon II	0
2.	Eselon III	4
3.	Eselon IV	12
4.	Pejabat Fungsional	166
5.	Staf/Fungsional Umum	72

Tabel 1.2
Kekuatan SDM Dinas Kesehatan Kota Blitar berdasarkan Golongan Tahun 2021

No.	Jabatan	Jumlah
1	2	3
1.	Golongan IV	22
2.	Golongan III	172
3.	Golongan II	48
4.	Golongan I	2
5.	PTT	8

2. Aspek Sarana Pelayanan Kesehatan

Dinas Kesehatan Kota Blitar memiliki sarana/prasarana yang diperlukan untuk mendukung kegiatan operasional baik operasional Dinas Kesehatan Kota Blitar maupun operasional UPT dibawahnya, yaitu UPT Puskesmas dan UPT Laboratorium Kesehatan Daerah.

- a. Kegiatan operasional Dinas Kesehatan Kota Blitar dilaksanakan di:
Kantor utama yang terletak di Jalan Sudanco Supriyadi No. 61 Blitar.
- b. Adapun kegiatan pelayanan kesehatan kepada masyarakat dilaksanakan di UPT Dinas Kesehatan yang terletak di:
 - 1) UPT Puskesmas Kepanjenkidul, Jalan Ciliwung No.178;
 - 2) UPT Puskesmas Sukorejo, Jalan Cemara No.163;
 - 3) UPT Puskesmas Sananwetan, Jalan Jawa No.07,
 - 4) UPT Laboratorium Kesehatan Daerah, Jalan Ciliwung No.180;

Sedangkan jumlah sarana kesehatan lainnya menurut kepemilikan, sebagai berikut:

Tabel 1.3
Jumlah Sarana Kesehatan menurut Kepemilikan Tahun 2021

No.	Fasilitas Kesehatan	Pemilik/Pengelola			Jumlah
		Pemerintah Daerah	TNI/ POLRI	Swasta	
1	2	3	4	5	6
1.	Rumah Sakit				
	Rumah Sakit Umum	1		4	5
	Rumah Sakit Khusus			1	1
2.	Puskesmas dan Jaringannya				
	Puskesmas Rawat Inap	0			0
	Puskesmas Non Rawat Inap	3			3
	Puskesmas Pembantu	17			17
3.	Sarana Pelayanan Lain				
	Balai pengobatan/klinik		2	8	10
	Praktik Dokter Umum Perorangan			43	43
	Praktik Dokter Gigi Perorangan			22	22
	Praktik Dokter Spesialis Perorangan			16	16
	Praktik Pengobatan Tradisional			13	13
	Unit Tranfusi Daerah	1			1
4.	Sarana Produksi dan Distribusi Kefarmasian				
	Apotek	1		41	42
	Toko Obat			6	6

Sumber : Data SDMK Dinas Kesehatan Kota Blitar Tahun 2021

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa sarana kesehatan yang ada di Kota Blitar cukup banyak dan tersebar merata di seluruh kecamatan terutama sarana pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat yaitu Puskesmas dan Puskesmas Pembantu.

3. Aspek Pembiayaan Kesehatan

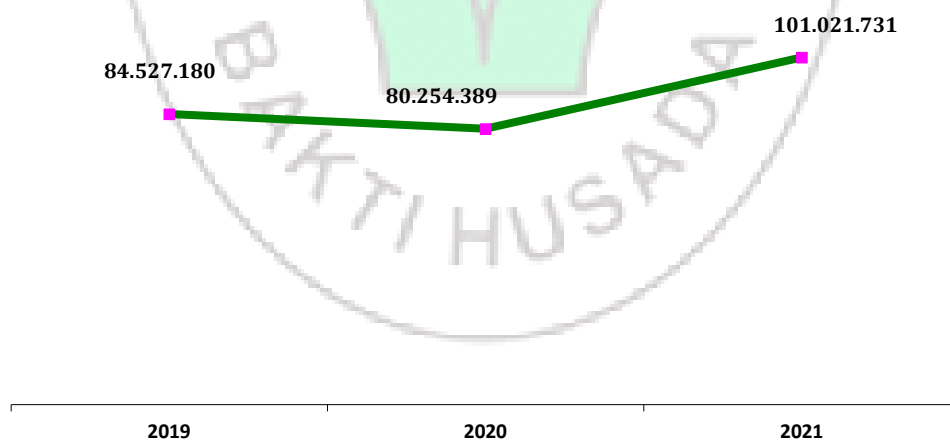
Anggaran untuk pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka mencapai sasaran yang ditetapkan dalam Renstra, yang berdasar APBD Pemerintah Kota Blitar, sebagaimana terlihat pada tabel berikut ini.

Tabel 1.4
Anggaran Pembiayaan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kota Blitar
Tahun 2019 - 2021

No.	Uraian	Jumlah Anggaran		
		2019	2020	2021
1	2	3	4	5
1.	Belanja Daerah:			
	Dinas Kesehatan	65.647.842.347,00	63.441.515.567,92	91.977.390.357,00
	UPT PKM Kepanjenkidul	6.336.413.838,00	4.977.834.728,00	2.876.618.100,00
	UPT PKM Sukorejo	6.022.172.483,00	5.350.291.995,00	2.656.578.761,00
	UPT PKM Sananwetan	6.520.751.534,00	6.484.746.966,00	3.511.143.992,00
	Jumlah Anggaran	84.527.180.202,00	80.254.389.256,92	101.021.731.210,00

Dari tabel diatas perkembangan pembiayaan kesehatan pada Dinas kesehatan Kota Blitar untuk Pembiayaan Belanja langsung, dapat digambarkan dalam grafik berikut:

Grafik 1.1
Perkembangan Anggaran Belanja Daerah Dinas Kesehatan
Tahun 2019-2021/000.



Anggaran yang tercantum dalam APBD Kota Blitar pada DPA Dinas Kesehatan, UPT Puskesmas Kota Blitar bersumber dana dari DID (Dana Insentif Daerah), DAU (Dana Alokasi Umum), DAK-Kes (Dana Alokasi Khusus Kesehatan), DAK Non-Fisik (Dana Alokasi Khusus Non Fisik), DBHPR (Dana Bagi Hasil Pajak Rokok), DBHCHT

(Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau), dan JKN-FKTP (Jaminan Kesehatan Nasional – Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama).

F. Isu-Isu Strategis

Beberapa Isu Strategis yang berdampak pada penyelenggaraan layanan kesehatan di Kota Blitar Tahun 2021, diantaranya:

1. Masih ada kematian ibu sejak awal periode Renstra sampai tahun 2020;
2. Naiknya Angka Kematian Bayi (AKB) sejak awal periode Renstra sampai tahun 2020;
3. Masih adanya balita stunting sejak awal periode Renstra sampai tahun 2020;
4. Belum tercapainya 100% Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan, terutama pelayanan kesehatan hipertensi dan pelayanan kesehatan pada usia produktif pada tahun 2020;
5. Masih adanya penyakit berbasis lingkungan.



BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Rencana Strategis 2016-2021

Rencana Strategis adalah merupakan proses sistematis yang berkelanjutan dari pembuatan keputusan yang beresiko, dengan memanfaatkan sebanyak-banyaknya pengetahuan antisipatif dan pengorganisasian secara sistematis usaha-usaha pelaksanaan keputusan tersebut serta mengukur hasilnya melalui umpan balik yang terorganisasi dan sistematis.

Visi Kota Blitar sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kota Blitar Tahun 2016 – 2021. Sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dari Pemerintah Kota Blitar, Dinas Kesehatan Kota Blitar akan secara aktif ikut mewujudkan Visi dan Misi Kota Blitar 5 tahun ke depan dengan tetap berorientasi pada hasil yang ingin dicapai sampai dengan tahun 2021 yang secara sistematis dan berkesinambungan harus memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Untuk itu Dinas Kesehatan Kota Blitar perlu menata semua komponen yang terlibat dalam mendukung pelaksanaannya baik personil, sarana prasarana, anggaran yang tersedia serta piranti lunak lainnya untuk dapat dimanfaatkan secara optimal dan berkelanjutan.

Penataan komponen pendukung salah satunya dapat dilakukan melalui penyusunan rencana program kerja tahunan PD dengan menetapkan Visi, Misi dan Program Kerja yang akan dipedomani sebagai dasar pelaksanaan tugas pokok dan fungsi bagi personil dalam mengoperasikan semua potensi yang ada guna mewujudkan hasil yang direncanakan.

Visi Kota Blitar sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kota Blitar Tahun 2016 – 2021 adalah ***“Masyarakat Kota Blitar Semakin Sejahtera : Religius, Cerdas, Sehat dengan Semangat Rukun Agawe Santoso”***.

Adapun Misi Kota Blitar tahun 2016 – 2021 adalah sebagai berikut:

1. meningkatkan tata kehidupan yang Religius, Nasionalis, Setara Gender dan Berkepribadian dalam Kebudayaan;

2. meningkatkan sumber daya manusia yang Keren, Berdaya Saing, Sehat Jasmani - Rohani, Cerdas, dan Berkarakter;
3. berdikari secara ekonomi yang berorientasi pada Ekonomi Kreatif, Pariwisata dan Perdagangan Berbasis Digital;
4. meningkatkan infrastruktur dan tata ruang yang Berwawasan Lingkungan Hidup dan Berkeadilan;
5. meningkatkan tata pemerintahan yang Baik dan Bersih Berbasis Teknologi Informasi.

Dengan pertimbangan di atas, maka Dinas Kesehatan Kota Blitar dapat menyusun Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kota Blitar untuk Tahun 2016-2021 sebagai pedoman dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan Kota Blitar pada Tahun Anggaran 2016 sampai dengan 2021 dengan memuat tujuan, sasaran, arah kebijakan dan strategi serta program dan kegiatan pokok yang akan dilaksanakan sampai dengan tahun 2021. Adapun Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kota Blitar Tahun 2016 – 2021 secara terperinci sebagaimana dalam ***"Lampiran. 1 LKj IP 2021: Matriks Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kota Blitar Tahun 2016 – 2021"***.

B. Perjanjian Kinerja Tahun 2021

Perjanjian Kinerja Tahun 2021 Dinas Kesehatan Kota Blitar adalah pernyataan komitmen pimpinan sebagai penerima amanah untuk mewujudkan janji mencapai kinerja tertentu yang telah disepakati bersama. Perjanjian kinerja tahun 2021 juga merupakan penjabaran dari sasaran dan program tahun ke-4 yang telah ditetapkan dalam RENSTRA PD Tahun 2016 – 2021. Perjanjian kinerja Tahun 2021 tersebut merupakan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh Indikator Kinerja Utama.

KINERJA UTAMA I



Meningkatnya akses pelayanan kesehatan

Indeks Keluarga Sehat (IKS) Kota Blitar

0,71 (skala)

KINERJA UTAMA 2

Meningkatnya
kualitas pelayanan
kesehatan masyarakat

- Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan kesehatan
BAIK
- Angka Kematian Ibu (AKI)
94,50 per-100.000 kelahiran hidup
- Angka Kematian Bayi (AKB)
8,08 per-1.000 kelahiran hidup
- Prevalensi Balita Stunting
10%

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah. Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kesehatan Kota Blitar Tahun 2021 sebagaimana dalam tabel berikut:

Tabel 2.1
Indikator Kinerja Utama (IKU)
Dinas Kesehatan Kota Blitar Tahun 2021

No	Kinerja Utama / Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan / Formulasi Penghitungan	Penanggung Jawab	Sumber Data
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya akses pelayanan kesehatan	Indeks Keluarga Sehat (IKS) Kota Blitar	(Jumlah total capaian kelompok indikator dibagi Jumlah kelompok indikator (keluarga mengikuti program KB, ibu melakukan persalinan di fasilitas kesehatan, bayi mendapat imunisasi dasar lengkap, bayi mendapat ASI eksklusif selama 6 bulan, Balita mendapatkan pemantauan pertumbuhan, penderita TB paru mendapatkan pengobatan sesuai standar, penderita hipertensi melakukan pengobatan secara teratur, penderita gangguan jiwa mendapatkan pengobatan dan tidak ditelantarkan, anggota keluarga tidak ada yang merokok, keluarga mempunyai akses/memiliki sarana air bersih, keluarga mempunyai akses/menggunakan jamban sehat, keluarga sudah menjadi anggota JKN)	Bidang Pelayanan dan SDM Kesehatan, Bidang Kesehatan Masyarakat, Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Laporan Pelayanan dan SDM Kesehatan, Bidang Kesehatan Masyarakat, Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
2.	Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan kesehatan	Rata-rata IKM 3 UPT Puskesmas ((Total dari nilai persepsi per unsur / Total unsur yang terisi) x Nilai penimbang)	Bidang Pelayanan dan SDM Kesehatan	Laporan Bidang Pelayanan dan SDM Kesehatan
		Angka Kematian Ibu (AKI)	(Jumlah ibu yang meninggal karena hamil, bersalin, dan nifas di suatu wilayah pada kurun waktu tertentu dibagi Jumlah kelahiran hidup di wilayah dan pada kurun waktu yang sama) x100.000	Bidang Kesehatan Masyarakat	Laporan Bidang Kesehatan Masyarakat

No	Kinerja Utama / Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan / Formulasi Penghitungan	Penanggung Jawab	Sumber Data
1	2	3	4	5	6
		Angka Kematian Bayi (AKB)	(Jumlah bayi usia 0-11 bulan yang meninggal di suatu wilayah pada kurun waktu tertentu dibagi Jumlah kelahiran hidup di wilayah dan pada kurun waktu yang sama) x1.000	Bidang Kesehatan Masyarakat	Laporan Bidang Kesehatan Masyarakat
		Prevalensi Balita Stunting	(Jumlah balita stunting / Jumlah seluruh balita) x 100%	Bidang Kesehatan Masyarakat	Laporan Bidang Kesehatan Masyarakat

Perjanjian Kinerja pada Dinas Kesehatan Kota Blitar Tahun 2021 ada 4 tingkatan yaitu:

1. Perjanjian kinerja antara Kepala Dinas Kesehatan Kota Blitar dengan Walikota Blitar;
2. Perjanjian kinerja antara Eselon III dengan Kepala Dinas Kesehatan Kota Blitar dan;
3. Perjanjian kinerja antara Eselon III dengan dengan Eselon IV;
4. Perjanjian kinerja antara staf dengan Eselon IV.

Untuk perjanjian kinerja antara Kepala Dinas Kesehatan Kota Blitar dengan Walikota yang selanjutnya disebut sebagai perjanjian kinerja organisasi terdapat dalam **"Lampiran 3 LKjIP 2021"**.

Adapun Rencana Kinerja Tahunan Dinas Kesehatan Kota Blitar Tahun 2021 secara terperinci sebagaimana dalam **"Lampiran 2 LKjIP 2021"**.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Dinas Kesehatan Kota Blitar selaku pengemban amanah masyarakat berkewajiban melaporkan hasil kinerjanya melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2016-2021 maupun Renja Tahun 2021 dimana penganggarannya telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan misi dan visi pemerintah daerah.

A. Pengukuran Capaian Kinerja/Sasaran

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi pemerintah daerah yang didukung dengan program dan kegiatan. Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran. Dalam laporan ini, Dinas Kesehatan Kota Blitar dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target sasaran strategis dari masing-masing indikator kinerja sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2016-2021 maupun Renja Tahun 2021.

Pengukuran Capaian Kinerja tersebut dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi kinerja tahun 2021 dengan realisasi kinerja tahun 2020, serta membandingkan dengan target nasional. Adapun cara menghitung capaian indikator kinerja dengan menggunakan rumus, sebagai berikut:

1. **Rumus 1:** Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka digunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Prosentase tingkat capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100 \%$$

2. **Rumus 2:** Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin rendah, maka digunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Prosentase tingkat capaian} = \frac{(2 \times \text{Rencana}) - \text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100 \%$$

Sedangkan pemberian atribut pada capaian masing-masing indikator kinerja, dengan kriteria yaitu:

No	Nilai Capaian Kinerja		Pemberian Atribut
	%	Keterangan Persentase	
1	2	3	4
1.	85 % s.d 100 %	Delapan puluh lima persen sampai dengan seratus persen	Sangat Berhasil
2.	70 % s.d < 85 %	Tujuh puluh persen sampai dengan kurang dari delapan puluh lima persen	Berhasil
3.	55 % s.d < 70 %	Lima puluh lima persen sampai dengan kurang dari tujuh puluh persen	Cukup Berhasil
4.	< 55 %	Di bawah lima puluh lima persen	Tidak Berhasil

1. Analisis Capaian Kinerja Berdasarkan Target dan Realisasi Tahun 2021

Analisis dan evaluasi telah dilakukan guna penyempurnaan/perbaikan perencanaan dan penanganan atau peningkatan kinerja di masa mendatang. Analisis atas pencapaian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2021 merupakan analisis terhadap komitmen Dinas Kesehatan Kota Blitar guna mencapai target kinerja sesuai tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam dokumen Indikator Kinerja Utama dan Perjanjian Kinerja Dinas Kesehatan Kota Blitar. Penjabaran analisis dan evaluasi capaian kinerja Dinas Kesehatan Kota Blitar pada tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1
Pencapaian Kinerja
Dinas Kesehatan Kota Blitar Tahun 2021

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2021	Realisasi 2021	% Capaian
Meningkatnya akses pelayanan kesehatan	1. Indeks Keluarga Sehat (IKS) Kota Blitar	0,71 (skala)	0,28 (skala)	39,44
Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan masyarakat	2. Indeks Kepuasan Masyarakat IKM) terhadap pelayanan kesehatan	BAIK	BAIK	100 / tercapai
	3. Angka Kematian Ibu (AKI)	94,50per-100.000 kelahiran hidup	889,59 per-100.000 kelahiran hidup	(-650)
	4. Angka Kematian Bayi (AKB)	8,08 per-1.000 kelahiran hidup	5,76 per-1.000 kelahiran hidup	128,71
	5. Prevalensi balita stunting	10%	5,28%	147,2

Sasaran 1 “Meningkatnya akses pelayanan kesehatan”, merupakan indikator derajat kesehatan masyarakat, yaitu:

1. Indeks Keluarga Sehat (IKS) Kota Blitar

Indeks Keluarga Sehat Kota Blitar tahun 2021 berdasarkan data per-31 Desember 2021 sebesar 0,28 masih kurang dari target daerah 0,71, yaitu dengan capaian 39,44% termasuk dalam kategori “**tidak berhasil**”. Kota Blitar termasuk dalam kategori “**keluarga tidak sehat**” dengan perhitungan jumlah keluarga sehat dibanding jumlah seluruh keluarga di Kota Blitar. Adapun nilai untuk masing-masing indikator Keluarga Sehat adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2
Persentase Capaian Indikator Keluarga Sehat Kota Blitar Tahun 2021

No.	Indikator Keluarga Sehat	Capaian (%)
1.	Keluarga mengikuti program Keluarga Berencana (KB)	44,83
2.	Ibu melakukan persalinan di fasilitas kesehatan	98,14
3.	Bayi mendapat imunisasi dasar lengkap	98,26
4.	Bayi mendapat air susu ibu (ASI) eksklusif	88,02
5.	Balita mendapatkan pemantauan pertumbuhan	96,25
6.	Penderita tuberkulosis paru mendapatkan pengobatan sesuai standar	36,02
7.	Penderita hipertensi melakukan pengobatan secara teratur	27,81
8.	Penderita gangguan jiwa mendapat pengobatan dan tidak ditelantarkan	36,88
9.	Anggota keluarga tidak ada yang merokok	56,44
10.	Keluarga sudah menjadi anggota jaminan kesehatan nasional (JKN)	57,12
11.	Keluarga mempunyai akses sarana air bersih	98,43
12.	Keluarga mempunyai akses atau menggunakan jamban sehat	98,22
Indeks Keluarga Sehat Kota Blitar		0,28

Capaian Indeks Keluarga Sehat (IKS) Kota Blitar tahun 2021 naik dari capaian tahun 2020 sebesar 0,04.

Dari tabel di atas, permasalahan utama atas capaian IKS adalah Penderita hipertensi melakukan pengobatan secara teratur sebesar 27,81%; Penderita

tuberkulosis paru mendapatkan pengobatan sesuai standar 36,02%; Penderita gangguan jiwa mendapat pengobatan dan tidak ditelantarkan 36,88; Keluarga mengikuti program Keluarga Berencana (KB) 44,83%; dan Anggota keluarga tidak ada yang merokok 56,44%.

Dalam pelaksanaan survei IKS Kota Blitar mengalami beberapa kendala antara lain intervensi terhadap permasalahan utama pada hasil survei tahun sebelumnya terhambat pelaksanaannya karena pandemi, data IKS tidak sinkron dengan data kinerja, dan fitur aplikasi PIS-PK yang belum optimal.

Data PIS-PK diharapkan menjadi gambaran secara menyeluruh kondisi kesehatan masyarakat tiap individu Kota Blitar dengan target sasaran seluruh penduduk Kota Blitar, sehingga dapat digunakan sebagai data awal untuk intervensi awal dan lanjutan dalam penentuan kebijakan kesehatan.

Sasaran 2 “Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan masyarakat”, merupakan indikator derajat kesehatan masyarakat, yaitu:

2. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap layanan kesehatan

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap layanan kesehatan dengan formula indikator rata-rata IKM 3 UPT Puskesmas, tercapai 100% atau termasuk dalam kategori “**sangat berhasil**” yang berasal dari perhitungan target dalam kategori nilai BAIK dengan realisasi BAIK. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap layanan kesehatan dapat menggambarkan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan di UPT Puskesmas se-Kota Blitar.

Kriteria nilai IKM:

Nilai Interval IKM	Kriteria	Mutu Layanan
25,00 – 64,99	Tidak Baik	D
65,00 – 76,60	Kurang Baik	C
76,61 – 88,30	Baik	B
88,30 – 100	Sangat Baik	A

Capaian IKM terhadap layanan kesehatan Kota Blitar adalah sebagai berikut:

a. UPT Puskesmas Sukorejo

Survei Kepuasan Masyarakat di UPT Puskesmas Sukorejo dilaksanakan 2 kali pada semester I dan semester II tahun 2021.

Penilaian IKM Puskesmas Sukorejo semester I dinilai dari unsur layanan sebagai berikut:

No.	Unsur Layanan	Nilai Rata-Rata Tiap Unsur
1.	Kesesuaian persyaratan pelayanan dengan jenis pelayanannya	3,70
2.	Kemudahan prosedur pelayanan	2,90
3.	Kecepatan waktu dalam memberikan pelayanan	2,87
4.	Kewajaran biaya/tarif dalam pelayanan	3,94
5.	Kesesuaian produk pelayanan antara yang tercantum dalam standar pelayanan dengan hasil yang diberikan	3,69
6.	Kemampuan/kompetensi petugas dalam memberikan pelayanan	2,98
7.	Perilaku petugas dalam memberikan pelayanan terkait dengan kesopanan dan keramahan	2,83
8.	Kualitas sarana prasarana	3,03
9.	Penanganan pengaduan pengguna layanan	3,71
	Rata-Rata Nilai Unsur	3,294

Nilai IKM didapatkan dari mengalikan rata-rata nilai unsur dengan konstanta (25) mendapatkan hasil 82,36 termasuk dalam kategori "**Baik**".

Penilaian IKM Puskesmas Sukorejo semester II dinilai dari unsur layanan sebagai berikut:

No.	Unsur Layanan	Nilai Rata-Rata Tiap Unsur
1.	Kesesuaian persyaratan pelayanan dengan jenis pelayanannya	3,44
2.	Kemudahan prosedur pelayanan	3,32
3.	Kecepatan waktu dalam memberikan pelayanan	3,14
4.	Kewajaran biaya/tarif dalam pelayanan	3,98

No.	Unsur Layanan	Nilai Rata-Rata Tiap Unsur
5.	Kesesuaian produk pelayanan antara yang tercantum dalam standar pelayanan dengan hasil yang diberikan	3,19
6.	Kemampuan/kompetensi petugas dalam memberikan pelayanan	3,28
7.	Perilaku petugas dalam memberikan pelayanan terkait dengan kesopanan dan keramahan	3,11
8.	Kualitas sarana prasarana	3,31
9.	Penanganan pengaduan pengguna layanan	3,23
	Rata-Rata Nilai Unsur	3,333

Nilai IKM didapatkan dari mengalikan rata-rata nilai unsur dengan konstanta (25) mendapatkan hasil 83,33 termasuk dalam kategori **“Baik”**.

Jadi, nilai rata-rata IKM UPT Puskesmas Sukorejo tahun 2021 adalah 82,58 termasuk dalam kategori **“Baik”**.

b. UPT Puskesmas Kepanjenkidul

Penilaian IKM Puskesmas Kepanjenkidul dinilai dari unsur layanan sebagai berikut:

No.	Unsur Layanan	Nilai Rata-Rata Tiap Unsur
1.	Kesesuaian persyaratan pelayanan dengan jenis pelayanannya	3,186
2.	Kemudahan prosedur pelayanan	3,771
3.	Kecepatan waktu dalam memberikan pelayanan	3,115
4.	Kewajaran biaya/tarif dalam pelayanan	3,092
5.	Kesesuaian produk pelayanan antara yang tercantum dalam standar pelayanan dengan hasil yang diberikan	3,176
6.	Kemampuan/kompetensi petugas dalam memberikan pelayanan	3,221
7.	Perilaku petugas dalam memberikan pelayanan terkait dengan kesopanan dan keramahan	3,023
8.	Kualitas sarana prasarana	3,510
9.	Penanganan pengaduan pengguna layanan	3,147

No.	Unsur Layanan	Nilai Rata-Rata Tiap Unsur
	Rata-Rata Nilai Unsur	3,213

Nilai IKM didapatkan dari mengalikan rata-rata nilai unsur dengan konstanta (25) mendapatkan hasil 80,32 termasuk dalam kategori “**Baik**”.

c. UPT Puskesmas Sananwetan

Penilaian IKM Puskesmas Sananwetan dinilai dari unsur layanan sebagai berikut:

No.	Unsur Layanan	Nilai Tiap Unsur
1.	Kesesuaian persyaratan pelayanan dengan jenis pelayanannya	3,80
2.	Kemudahan prosedur pelayanan	3,72
3.	Kecepatan waktu dalam memberikan pelayanan	3,70
4.	Kewajaran biaya/tarif dalam pelayanan	3,37
5.	Kesesuaian produk pelayanan antara yang tercantum dalam standar pelayanan dengan hasil yang diberikan	3,32
6.	Kemampuan/kompetensi petugas dalam memberikan pelayanan	3,32
7.	Perilaku petugas dalam memberikan pelayanan terkait dengan kesopanan dan keramahan	3,29
8.	Kualitas sarana prasarana	3,12
9.	Penanganan pengaduan pengguna layanan	2,88
	Rata-Rata Nilai Unsur	3,391

Nilai IKM didapatkan dari mengalikan rata-rata nilai unsur dengan konstanta (25) mendapatkan hasil 84,78 termasuk dalam kategori “**Baik**”.

Dari analisa tiap Puskesmas didapatkam nilai IKM terhadap layanan kesehatan Kota Blitar sebagai berikut:

Tabel 3.3
Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Kesehatan Kota Blitar
Tahun 2021

No.	Puskesmas	Nilai	Kategori
1.	Sukorejo	82,85	BAIK
2.	Kepanjenkidul	80,32	BAIK
3.	Sananwetan	84,78	BAIK
	Dinas Kesehatan Kota Blitar	82,65	BAIK

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) digunakan sebagai parameter dalam peningkatan sarana dan prasarana Puskesmas dan jaringannya dan peningkatan performa pelayanan kesehatan oleh petugas kesehatan. IKM sebagai penggambaran bentuk kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan pemerintah di bidang kesehatan.

3. Angka Kematian Ibu (AKI)

Angka Kematian Ibu (AKI) mengacu pada jumlah kematian ibu yang terkait dengan kehamilan, persalinan dan nifas. Angka Kematian Ibu adalah banyaknya wanita meninggal dari suatu penyebab kematian terkait gangguan kehamilan atau penanganannya (tidak termasuk kasus kecelakaan atau insidentil) selama kehamilan, melahirkan dan masa nifas (42 hari setelah melahirkan) tanpa memperhitungkan usia kehamilan per-100.000 kelahiran hidup pada waktu dan wilayah tertentu.

Jumlah kasus kematian ibu terkait kehamilan, persalinan dan masa nifas Kota Blitar tahun 2021 sebanyak 17 kasus dengan jumlah kelahiran hidup di tahun yang sama sebanyak 1.911 kelahiran hidup. Maka AKI Kota Blitar tahun 2021 sebesar 889,59 per-100.000 kelahiran hidup tidak mencapai target daerah sebesar 94,50 per 100.000 kelahiran hidup.

Kematian ibu disebabkan oleh perdarahan 1 kasus, jantung 1 kasus, abortus 1 kasus, dan penyebab lainnya 14 kasus termasuk karena covid-19 sebanyak 11 kasus. Kondisi penyakit penyerta seperti covid-19 pada kematian ibu menjadi penyumbang terbanyak kasus kematian ibu. Hal tersebut dikarenakan dalam kondisi covid-19 kondisi hamil dan pasca persalinan dapat dikategorikan sebagai komorbid, sehingga

memperberat kondisi ibu. Selain itu, kematian ibu pada kondisi covid-19 yang dirawat di fasilitas pelayanan kesehatan dengan gejala berat sesak nafas (pneumonia) sehingga menyulitkan penanganan.

4. Angka Kematian Bayi (AKB)

Angka Kematian Bayi (AKB) adalah angka yang menunjukkan banyak kematian bayi usi 0-11 bulan dari setiap 1.000 kelahiran hidup pada waktu dan wilayah tertentu.

Jumlah kematian bayi Kota Blitar tahun 2021 sebanyak 11 kasus dengan jumlah kelahiran hidup 1.911. Maka AKB Kota Blitar tahun 2021 sebesar 5,76 per-1.000 kelahiran hidup dari target daerah sebesar 8,08 per-1.000 kelahiran hidup, dengan tingkat capaian 128,71%.

Kasus kematian bayi di Kota Blitar disebabkan karena BBLR (berat badan lahir rendah) sebanyak 5 kasus, BBLR dan asfiksia sebanyak 4 kasus, asfiksia sebanyak 1 kasus, dan karena penyebab lain sebanyak 1 kasus.

5. Prevalensi balita stunting

Prevalensi balita stunting dengan formula indikator jumlah balita stunting dibagi jumlah seluruh balita dikalikan 100%. Dalam capaian prevalensi balita stunting ini mengikuti hasil perhitungan dari Kementerian Kesehatan RI untuk dipublikasikan. Indikator tersebut tercapai 147,2% atau termasuk dalam kategori *“sangat berhasil”* yang berasal dari perhitungan target 10% dengan realisasi 5,28%.

Menurut UNICEF (1998), pertumbuhan dipengaruhi oleh sebab langsung dan tidak langsung. Penyebab langsung diantaranya adalah asupan makanan dan keadaan kesehatan, sedangkan penyebab tidak langsung meliputi ketersediaan dan pola konsumsi rumah tangga, pola pengasuhan anak, sanitasi lingkungan dan pemanfaatan pelayanan kesehatan. Faktor-faktor tersebut ditentukan oleh sumber daya manusia, ekonomi dan organisasi melalui faktor pendidikan. Penyebab paling mendasar dari tumbuh kembang adalah masalah struktur politik, ideologi, dan sosial ekonomi yang dilandasi oleh potensi sumber daya yang ada (Supriasa et al., 2012).

2. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2020 – 2021

Adapun perbandingan data kinerja antara realisasi kinerja tahun 2020 – 2021 untuk setiap indikatornya adalah sebagai berikut:

Tabel 3.4
Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2020 - 2021

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		Capaian (%)	
			2020	2021	2020	2021	2020	2021
1	2	3	5	6	8	9	11	12
1.	Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup (AHH)	74,51	74,65	73,75	73,86	98,98	98,94
A.	<i>Meningkatnya akses pelayanan kesehatan</i>	Indeks Keluarga Sehat (IKS) Kota Blitar	0,70 (skala)	0,71 (skala)	0,24 (skala)	0,28 (skala)	34,29	39,44
B.	<i>Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan masyarakat</i>	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan kesehatan	BAIK	BAIK	BAIK	BAIK	100	100
		AKI (Angka Kematian Ibu per 100.000 kelahiran hidup)	141,71	94,50	189,13	889,59	66,54	(-650)
		AKB (Angka Kematian Bayi per 1.000 kelahiran hidup)	8,28	8,08	11,82	5,76	57,25	128,71
		Prevalensi balita stunting	10%	10%	7,25%	5,28%	127,5	147,2

3. Perbandingan Realisasi Kinerja s.d. Akhir Periode Renstra

Adapun perbandingan realisasi kinerja Dinas Kesehatan Kota Blitar Tahun 2021 terhadap target periode akhir Rencana Dinas Kesehatan Kota Blitar Tahun 2016 – 2021 ditunjukkan dalam tabel berikut:

Tabel 3.5
Perbandingan Realisasi Kinerja s.d. Akhir Periode Renstra

Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Akhir RENSTRA	Realisasi s/d 2021	Tingkat Kemajuan
Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup (AHH)	74,65	73,86	98,94%
Meningkatnya akses pelayanan kesehatan	Indeks Keluarga Sehat (IKS) Kota Blitar	0,71 (skala)	0,28 (skala)	39,44%
Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan kesehatan	BAIK	BAIK	100%
	AKI (Angka Kematian Ibu per 100.000 kelahiran hidup)	94,50	889,59	(-650)%
	AKB (Angka Kematian Bayi per 1.000 kelahiran hidup)	8,08	5,76	128,71%
	Prevalensi balita stunting	10%	5,28%	147,2%

4. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Provinsi Jawa Timur (Target SPM)

Indikator pada Tujuan Renstra Dinas Kesehatan merupakan Indikator Derajat Kesehatan, data capaian yang diperoleh merupakan data tahun 2021. Dalam rangka pencapaian target renstra, Dinas Kesehatan didukung oleh pencapaian kinerja Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan. Adapun perbandingan realisasi kinerja SPM Dinas Kesehatan Kota Blitar dengan realisasi Provinsi Jawa Timur ditunjukkan dalam tabel berikut:

Tabel 3.6
Perbandingan Realisasi Kinerja Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan Kota Blitar Tahun 2021 dengan Realisasi Provinsi Jawa Timur

No	Jenis Pelayanan	Indikator Kinerja	Realisasi Provinsi *)	Realisasi Daerah Tahun 2021	Ket.
1.	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	90,0	82,96	-
2.	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	94,2	88,58	-
3.	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	96,1	88,26	-
4.	Pelayanan Kesehatan Balita	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	83,7	29,19	-
5.	Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	77,5	92,85	+
6.	Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	47,8	36,86	-
7.	Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	47,2	88,37	+
8.	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Persentase penderita Hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	35,6	17,58	-
9.	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	89,8	71,15	-

No	Jenis Pelayanan	Indikator Kinerja	Realisasi Provinsi *)	Realisasi Daerah Tahun 2021	Ket.
10.	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) berat	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	85,4	100,37	+
11.	Pelayanan Kesehatan Orang terduga Tuberkulosis	Persentase Orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	100	45,73	-
12.	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko terinfeksi Virus yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus = HIV)	Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	59,5	123,42	+

Keterangan

: *) Data capaian Provinsi Jawa Timur Tahun 2020
+ realisasi daerah lebih besar dari realisasi provinsi
- realisasi daerah lebih kecil dari realisasi provinsi

B. Akuntabilitas Keuangan (Cost per Outcome)

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Dinas Kesehatan Kota Blitar didukung dengan dana yang cukup untuk penyelenggaraan layanan kesehatan di Dinas Kesehatan Kota Blitar dan 3 (tiga) UPT Puskesmas, yaitu Kepanjenkidul, Sukorejo dan Sananwetan. Pada tahun 2021 jumlah anggaran adalah sebagai berikut:

1. Belanja Operasi	:	Rp.	96.808.665.207,00
2. Belanja Modal	:	Rp.	4.213.066.003,00
Belanja Daerah	:	Rp.	101.021.731.210,00

Dari anggaran Belanja Daerah sebesar Rp. 101.021.731.210,00 sampai dengan bulan Desember 2021 telah terealisasi sebesar Rp. 94.133.561.313,30 (93,18%). Adapun khusus untuk anggaran dan realisasi belanja daerah tahun 2021 tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 3.7
Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung Tahun 2021

Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1		2	3	4
Dinas Kesehatan		91.977.390.357,00	86.394.444.476,30	93,93
I	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya kesehatan Masyarakat	56.710.155.915,00	53.620.922.336,76	94,55
	a. Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	7.216.361.247,00	6.513.192.669,76	90,26
	1. Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	1.158.000.000,00	1.158.000.000,00	100
	2. Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	2.086.050.000,00	1.886.200.000,00	90,42
	3. Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	399.484.040,00	385.229.821,84	96,43
	4. Pengadaan Obat, Vaksin	994.807.731,00	731.781.690,00	73,56
	5. Pengadaan Bahan Habis Pakai	2.395.871.014,00	2.178.012.057,92	90,91
	6. Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	79.056.162,00	78.879.900,00	99,78
	7. Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	103.092.300,00	95.089.200,00	92,24
	b. Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	49.346.675.568,00	46.989.614.307,00	95,22
	1. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	68.333.130,00	61.020.600,00	89,30
	2. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	135.375.000,00	126.775.000,00	93,65
	3. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	6.900.000,00	2.300.000,00	33,33
	4. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	2.740.000,00	2.740.000,00	100
	5. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	2.492.000,00	2.492.000,00	100
	6. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	2.115.000,00	2.115.000,00	100
	7. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	68.035.440,00	66.066.000,00	97,11
	8. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	8.189.900,00	8.189.900,00	100
	9. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	83.854.200,00	69.994.200,00	83,47
	10. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	58.212.000,00	55.338.500,00	95,06
	11. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	121.861.600,00	107.294.060,00	88,05
	12. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	319.079.410,00	273.869.580,00	85,83
	13. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	3.237.793.089,00	2.397.277.163,00	74,04
	15. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	67.023.600,00	64.219.600,00	95,82

Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1		2	3	4
	16. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	32.712.690,00	30.971.000,00	94,68
	17. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	60.566.000,00	58.748.800,00	97,00
	18. Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	225.085.405,00	214.900.700,00	95,48
	19. Pengelolaan Surveilans Kesehatan	3.807.590.620,00	3.747.002.858,00	98,41
	20. Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	2.990.000,00	2.970.700,00	99,35
	21. Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	305.583.000,00	291.180.133,00	95,29
	22. Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	31.139.130.594,00	30.803.313.317,00	98,92
	23. Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	8.000.000,00	0,00	0,00
	24. Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	258.110.300,00	251.518.400,00	97,45
	25. Operasional Pelayanan Puskesmas	8.524.838.490,00	7.727.500.064,00	90,65
	26. Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	601.698.000,00	587.868.732,00	97,70
	27. Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	153.745.000,00	0,00	0,00
	28. Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	32.278.200,00	21.605.100,00	66,93
	29. Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	12.342.900,00	12.342.900,00	100
	c. Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	67.527.600,00	67.182.500,00	99,49
	1. Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	67.527.600,00	67.182.500,00	99,49
	d. Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	79.591.500,00	50.932.860,00	63,99
	1. Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	74.980.500,00	47.551.860,00	63,42
	2. Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	4.611.000,00	3.381.000,00	73,32
II	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	849.862.000,00	689.069.400,00	81,08
	a. Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	3.600.000,00	3.600.000,00	100
	1. Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	3.600.000,00	3.600.000,00	100
	b. Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	649.622.100,00	538.596.500,00	82,91
	1. Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	585.750.000,00	479.250.000,00	81,82
	2. Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	63.872.100,00	59.346.500,00	92,91
	c. Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	196.639.900,00	146.872.900,00	74,69
	1. Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	196.639.900,00	146.872.900,00	74,69

Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1		2	3	4
III	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	315.504.900,00	233.601.225,00	74,04
	a. Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	120.120.200,00	90.404.925,00	75,26
	1. Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	99.671.300,00	70.285.925,00	70,52
	2. Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	20.448.900,00	20.119.000,00	98,39
	b. Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	110.679.400,00	80.798.400,00	73,00
	1. Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	110.679.400,00	80.798.400,00	73,00
	c. Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	84.705.300,00	62.397.900,00	73,66
	1. Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	84.705.300,00	62.397.900,00	73,66
IV	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	2.339.958.000,00	2.282.962.000,00	97,56
	a. Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2.284.958.000,00	2.228.588.600,00	97,53
	1. Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	2.284.958.000,00	2.228.588.600,00	97,53
	b. Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	55.000.000,00	54.373.400,00	98,86
	1. Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	55.000.000,00	54.373.400,00	98,86
V	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	31.761.909.542,00	29.567.889.514,54	93,09
	a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	68.613.700,00	58.697.100,00	85,55
	1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	46.301.900,00	39.380.900,00	85,05

Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1		2	3	4
	2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	22.311.800,00	19.316.200,00	86,57
	b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	30.086.710.616,00	27.943.325.721,00	92,88
	1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	30.058.049.816,00	27.914.840.421,00	92,87
	2. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	13.360.800,00	13.185.300,00	98,69
	3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	15.300.000,00	15.300.000,00	100
	c. Administrasi Umum Perangkat Daerah	331.899.000,00	328.837.800,00	99,08
	1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.223.100,00	6.223.100,00	100
	2. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	6.471.000,00	6.471.000,00	100
	3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	54.127.100,00	51.245.900,00	94,68
	4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	30.537.500,00	30.537.500,00	100
	5. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	7.200.000,00	7.020.000,00	97,50
	6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	227.340.300,00	227.340.300,00	100
	d. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.052.673.576,00	1.019.273.182,54	96,83
	1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	207.098.100,00	202.008.409,00	97,54
	2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	845.575.476,00	817.264.773,54	96,65
	c. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	222.012.650,00	217.755.711,00	98,08
	1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	168.470.750,00	164.213.811,00	97,47
	2. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	21.745.100,00	21.745.100,00	100
	3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	31.796.800,00	31.796.800,00	100
	UPT Puskesmas Kepanjenkidul	2.876.618.100,00	2.635.443.571,00	91,62
I	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	2.826.182.200,00	2.593.396.171,00	91,76
	a. Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	248.227.200,00	245.236.950,00	98,80
	1. Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	149.101.550,00	146.132.800,00	98,01
	2. Pengadaan Obat, Vaksin	99.125.650,00	99.104.150,00	99,98
	b. Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2.577.955.000,00	2.348.159.221,00	91,09
	1. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	17.706.000,00	17.706.000,00	100
	2. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	3.870.000,00	3.870.000,00	100
	3. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	2.750.000,00	2.750.000,00	100
	4. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	2.900.000,00	2.900.000,00	100

Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1		2	3	4
	5. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	24.218.800,00	19.499.400,00	80,51
	6. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	2.745.300,00	2.745.300,00	100
	7. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	84.112.800,00	83.443.700,00	99,20
	8. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1.835.000,00	1.835.000,00	100
	9. Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	58.788.100,00	55.053.200,00	93,65
	10. Pengelolaan Surveilans Kesehatan	45.595.850,00	44.351.200,00	97,27
	11. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	300.000,00	300.000,00	100
	12. Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	82.010.100,00	76.397.800,00	93,16
	13. Operasional Pelayanan Puskesmas	2.046.491.050,00	1.859.883.921,00	90,88
I	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	50.435.900,00	42.047.400,00	83,37
	a. Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	50.435.900,00	42.047.400,00	83,37
	1. Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	50.435.900,00	42.047.400,00	83,37
	UPT Puskesmas Sukorejo	2.656.578.761,00	2.023.793.140,00	76,18
I	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	2.656.578.761,00	2.023.793.140,00	76,18
	a. Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	305.057.593,00	229.030.640,00	75,08
	1. Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	37.000.000,00	30.232.800,00	81,71
	2. Pengadaan Obat, Vaksin	258.057.593,00	198.797.840,00	77,04
	3. Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	10.000.000,00	0,00	0,00
	b. Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2.351.521.168,00	1.794.762.500,00	76,32
	1. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	2.782.000,00	2.782.000,00	100
	2. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	11.000.000,00	11.000.000,00	100
	3. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	5.544.900,00	2.288.200,00	41,27
	4. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	16.230.000,00	10.593.300,00	65,27
	5. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	125.858.000,00	64.755.000,00	51,45
	6. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	32.500.000,00	32.500.000,00	100
	7. Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	16.030.900,00	16.030.900,00	100
	8. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	51.076.200,00	51.076.200,00	100

Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1		2	3	4
	9. Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	128.833.400,00	95.116.400,00	73,83
	10. Operasional Pelayanan Puskesmas	1.961.665.768,00	1.508.620.500,00	76,91
UPT Puskesmas Sananwetan		3.511.143.992,00	3.079.880.126,00	87,72
I	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	3.511.143.992,00	3.079.880.126,00	87,72
	a. Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	443.514.617,00	435.155.277,00	98,12
	1. Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	39.220.520,00	39.220.520,00	100
	2. Pengadaan Obat, Vaksin	404.294.097,00	395.934.757,00	97,93
	b. Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
	1. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	12.150.000,00	12.150.000,00	100
	2. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	78.706.800,00	78.484.800,00	99,72
	3. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	42.936.700,00	41.496.700,00	96,65
	4. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	190.430.600,00	144.973.600,00	76,13
	5. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	20.000.000,00	14.774.800,00	73,87
	6. Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	73.706.300,00	72.526.700,00	98,40
	7. Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12.079.600,00	8.138.600,00	67,37
	8. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	33.976.600,00	19.995.600,00	58,85
	9. Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	50.054.600,00	12.065.600,00	24,10
	10. Operasional Pelayanan Puskesmas	2.553.588.175,00	2.240.118.449,00	87,72
JUMLAH TOTAL DINAS KESEHATAN		101.021.731.210,00	94.133.561.313,30	93,18

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa anggaran yang terealisasi sebesar **Rp. 94.133.561.313,30** dari total anggaran sebesar **Rp. 101.021.731.210,00** atau sebesar **93,18%**. Hal ini menunjukkan bahwa realisasi anggaran dari Dinas Kesehatan Kota Blitar tahun 2021 termasuk **"berhasil"**.

Secara umum kinerja keuangan per-program sudah baik, ada beberapa aktivitas kegiatan yang tidak terealisasi pada Program/Kegiatan/Sub Kegiatan:

1. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
 - a. Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir berupa aktivitas Audit Maternal Perinatal hanya dapat dilakukan satu kali karena terkendala pandemi.

- b. Sub Kegiatan Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional tidak dapat direalisasikan karena jasa tenaga laboratorium BBLK tidak dikenakan biaya.
- c. Sub Kegiatan Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota tidak dapat direalisasikan karena proses pelaksanaan akreditasi puskesmas akan dilaksanakan setelah status wabah covid-19 telah dinyatakan oleh pemerintah
- d. Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan pada UPT Puskesmas Sukorejo berupa aktivitas kegiatan kalibrasi alat kesehatan tidak dapat direalisasikan karena kalibrasi alkes sudah dipenuhi oleh Dinas Kesehatan.
- e. Sub Kegiatan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular pada UPT Puskesmas Sananwetan berupa aktivitas kegiatan Skrining Posbindu PTM tidak dapat dilaksanakan karena sesuai SE Walikota Blitar agar pelaksanaan Posbindu PTM ditiadakan selama kondisi pandemi.

Sedangkan capaian Kinerja Program, sebagai berikut:

Program Kewenangan Wajib Bidang Kesehatan:

1. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat

Indikator	Target	Realisasi	% Capaian
Persentase kelurahan UCI (Universal Child Immunization)	90%	85,71%	95,23%
Persentase Puskesmas terakreditasi	100%	100%	100%
Angka Kematian Balita	8,2 per-1000 kelahiran hidup	5,2 per- 1000 kelahiran hidup	136,59%
Prevalensi Balita Gizi Buruk	0,1%	0,037%	163%
Persentase warga negara usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100%	36,86%	36,86%

Persentase KLB Kelurahan yang ditangani < 24 jam	100%	100%	100%
Persentase Ibu Hamil mendapatkan pelayanan ibu hamil	100%	82,96%	82,96%

2. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan

Indikator	Target	Realisasi	% Capaian
Persentase Puskesmas yang terakreditasi	100%	100%	100%

3. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Makanan Minuman

Indikator	Target	Realisasi	% Capaian
Persentase Puskesmas yang terakreditasi	100%	100%	100%
Persentase kelurahan siaga aktif Purnama dan Mandiri	90,48%	85,71%	94,73%

4. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan

Indikator	Target	Realisasi	% Capaian
Persentase kelurahan siaga aktif Purnama dan Mandiri	90,48%	85,71%	94,73%

Program Non Urusan:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Indikator	Target	Realisasi	% Capaian
Persentase Dokumen Perencanaan dan Pelaporan tersusun tepat waktu dan sesuai dengan aturan	100%	87,5%	87,5%
Tingkat Partisipasi Daerah dalam Agenda Kota	100%	100%	100%
Persentase Kecukupan Pelayanan Perkantoran	100%	90,39%	90,39%

1. Alokasi Per-Sasaran Pembangunan

Untuk mengetahui prosentase anggaran pada sasaran strategis dibandingkan dengan keseluruhan anggaran Belanja Daerah pada Dinas Kesehatan Kota Blitar Tahun 2021 sebagai berikut:

Tabel 3.8
Anggaran Belanja Daerah pada Sasaran Strategis Dibandingkan Dengan
Keseluruhan Anggaran Belanja Daerah Dinas Kesehatan Kota Blitar
Tahun 2021

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Anggaran (Rp)	% Anggaran
1.	Meningkatnya akses pelayanan kesehatan	Indeks Keluarga Sehat (IKS) Kota Blitar	2.390.393.900,00	2,37
2.	Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan kesehatan	66.367.029.538,00	65,70
		Angka Kematian Ibu (AKI)	260.321.830,00	0,26
		Angka Kematian Balita (AKB)	38.440.000,00	0,04
		Prevalensi Balita Stunting	203.636.400,00	0,20
Jumlah			69.259.821.668,00	68,56

Jadi total anggaran Program Upaya Strategis sebesar Rp. 69.259.821.668,00 (68,56%) dari total anggaran belanja daerah, sedangkan yang 31,44% atau sebesar Rp. 31.761.909.542,00 merupakan anggaran pendukung Upaya Strategis (Administrasi Umum), diantaranya:

Tabel 3.9
Anggaran Belanja Daerah pada Program Administrasi Umum Dibandingkan
Dengan Keseluruhan Anggaran Belanja Daerah Dinas Kesehatan Kota Blitar
Tahun 2021

No	Sasaran / Program	Indikator Kinerja	Anggaran (Rp)	% Anggaran
1.	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Dokumen Perencanaan dan Pelaporan tersusun tepat waktu dan sesuai dengan aturan	31.761.909.542,00	31,44
		Tingkat Partisipasi Daerah dalam Agenda Kota		
		Persentase Kecukupan Pelayanan Perkantoran		
Jumlah			31.761.909.542,00	31,44

2. Pencapaian Kinerja dan Anggaran

Pencapaian kinerja dan anggaran Dinas Kesehatan Kota Blitar Tahun 2021 ditunjukkan dalam tabel berikut:

Tabel 3.10
Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2021

Sasaran/ Program	Indikator	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian	Alokasi (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian
A. Meningkatnya akses pelayanan kesehatan	Indeks Keluarga Sehat (IKS) Kota Blitar	0,71 (sakala)	0,28 (sakala)	39,44%	2.390.393.900,00	2.325.009.400,00	97,26%
1. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase kelurahan siaga aktif Purnama dan Mandiri	90,48%	85,71%	94,73%	2.390.393.900,00	2.325.009.400,00	97,26%
B. Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan kesehatan	BAIK	BAIK	100%	66.367.029.538,00	61.775.451.098,76	93,08%
2. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Presentase Puskesmas terakreditasi	100%	100%	100%	65.201.662.638,00	60.852.780.473,76	93,33%
	Persentase warga negara usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100%	36,86%	36,86%			
	Persentase kelurahan UCI (Universal Child Immunization)	90%	85,71%	26,81%			
	Persentase KLB Kelurahan yang ditangani < 24 jam	100%	100%	100%			
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia	Presentase Puskesmas terakreditasi	100%	100%	100%	849.862.000,00	689.069.400,00	81,08%

Sasaran/ Program	Indikator	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian	Alokasi (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian
4. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Presentase Puskesmas terakreditasi	100%	100%	100%	315.504.900,00	233.601.225,00	74,04%
	Persentase kelurahan siaga aktif Purnama dan Mandiri	90,48%	85,71%	94,73%			
	Angka Kematian Ibu (AKI)	94,50 per-100.000 kelahiran hidup	889,59 per-100.000 kelahiran hidup	(-650)%	260.321.830,00	236.433.200,00	90,82%
5. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase Ibu Hamil mendapatkan pelayanan ibu hamil	100%	82,96%	82,96%	260.321.830,00	236.433.200,00	90,82%
	Angka Kematian Bayi (AKB)	8,08 per-1.000 kelahiran hidup	5,76 per-1.000 kelahiran hidup	128,71%	38.440.000,00	33.840.000,00	88,03%
6. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Angka Kematian Balita	8,2 per-1.000 kelahiran hidup	5,2 per-1.000 kelahiran hidup	136,59%	38.440.000,00	33.840.000,00	88,03%
	Prevalensi Balita Stunting	10%	5,28%	147,2%	203.636.400,00	194.938.100,00	95,73%
7. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Prevalensi Balita Gizi Buruk	0,1%	0,037%	163%	203.636.400,00	194.938.100,00	95,73%
Total					69.259.821.668,00	64.565.671.798,76	93,22

Sasaran/ Program	Indikator	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian	Alokasi (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian
8. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Dokumen Perencanaan dan Pelaporan tersusun tepat waktu dan sesuai dengan aturan	100%	87,5%	87,5%	31.761.909.542,00	29.567.889.514,54	93,09
	Tingkat Partisipasi Daerah dalam Agenda Kota	100%	100%	100%			
	Persentase Kecukupan Pelayanan Perkantoran	100%	90,39%	90,39%			
Total					31.761.909.542,00	29.567.889.514,54	93,09



3. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Untuk efisiensi penggunaan anggaran atas kinerja ditunjukkan dalam tabel berikut:

Tabel 3.11
Efisiensi Penggunaan Anggaran

No	Sasaran	Indikator	Capaian Kinerja (%)	Penyerapan Anggaran (%)	Tingkat Efisiensi	Ket.
1.	Meningkatnya akses pelayanan kesehatan	Indeks Keluarga Sehat (IKS) Kota Blitar	39,44	97,26	0,41	Tidak efisien
2.	Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan kesehatan	100	93,08	1,07	Efisien
		Angka Kematian Ibu (AKI)	(-650)	90,82	(-7,16)	Tidak efisien
		Angka Kematian Bayi (AKB)	128,71	88,03	1,46	Efisien
		Prevalensi Balita Stunting	147,2	95,73	1,54	Efisien

Tingkat efisien capaian kinerja terhadap penyerapan anggaran Dinas Kesehatan Kota Blitar tahun 2021 masih ada dua indikator kinerja utama (IKU) yang tidak efisien, antara lain:

1. Indeks Keluarga Sehat (IKS) Kota Blitar, tingkat efisiensi sebesar 0,41. Hal tersebut dikarenakan capaian kinerja IKS Kota Blitar lebih rendah dari pada target yang ditetapkan. Walaupun demikian, capaian IKS Kota Blitar tahun 2021 meningkat dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya. Maka, penyerapan anggaran sebagai upaya peningkatan IKS Kota Blitar cukup berhasil dalam upaya peningkatan capaian IKS Kota Blitar.
2. Angka Kematian Ibu (AKI), tingkat efisiensi sebesar (-7,16). Hal ini dikarenakan penambahan AKI pada tahun 2021 sangat tinggi akibat penyakit covid-19 pada ibu hamil maupun bersalin.

C. Prestasi/Penghargaan

Pada Tahun 2021, ada 4 (empat) penghargaan yang diterima oleh Dinas Kesehatan Kota Blitar yaitu:

1. Penghargaan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) Award Tahun 2021.
2. Penghargaan Kota Sehat - Swasti Saba Wistara 3 Tahun 2021.
3. Sertifikat Eradikasi Frambusia Kota Blitar Tahun 2021.
4. Penghargaan Terbaik 2 Penilaian SAKIP Kota Blitar Tahun 2021.



BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2021 merupakan perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan pengelolaan sumberdaya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada Dinas Kesehatan Kota Blitar. LKjIP juga disusun karena perannya sebagai alat kendali, penilai kualitas kerja dan sebagai pendorong perwujudan *Good Governance*. Dilain pihak, LKjIP juga merupakan media pertanggungjawaban kepada publik yang dapat digunakan sebagai alat introspeksi dan refleksi terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab.

Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatkan akses pelayanan kesehatan	Indeks Keluarga Sehat (IKS) Kota Sehat	0,71 (skala)	0,28 (skala)	39,44%
Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan kesehatan	BAIK	BAIK	100%
	Angka Kematian Ibu (AKI)	94,50 per-100.000 kelahiran hidup	889,59 per-100.000 kelahiran hidup	(-650)%
	Angka Kematian Bayi (AKB)	8,08 per-1.000 kelahiran hidup	5,76 per-1.000 kelahiran hidup	128,71%
	Prevalensi balita stunting	10%	5,28%	147,2%
Rata-rata capaian kinerja				(-46,93)%

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan keterkaitan dalam pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam mewujudkan tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Blitar tahun 2021 termasuk kategori 4 (empat) dengan nilai rata-rata capaian kinerja **(-46,93)%** atau **"tidak berhasil"**.

Akuntabilitas kinerja cukup rendah dikarenakan Angka Kematian Ibu sangat tinggi jauh dari target yang ditentukan. Kematian ibu terbanyak pada kondisi pandemi ini dikarenakan penyakit covid-19 yang diderita baik ibu hamil maupun pasca persalinan. Kondisi penyakit covid-19 pada ibu hamil dan ibu bersalin dapat dikategorikan sebagai komorbid, sehingga memperberat kondisi ibu. Selain itu, kematian ibu pada kondisi covid-19 yang dirawat di fasilitas pelayanan kesehatan dengan gejala berat sesak nafas (pneumonia) sehingga menyulitkan penanganan.

Sedangkan akuntabilitas keuangan/kinerja keuangan sebesar **93,18%** dikategorikan "**berhasil**", seperti pada tabel di bawah ini, masih dijumpai beberapa permasalahan dalam pelaksanaannya.

Jenis Belanja	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian
Belanja Operasi	96.808.665.207,00	90.375.820.113,30	93,36%
Belanja Modal	4.213.066.003,00	3.757.741.200,00	89,19%
Jumlah	101.021.731.210,00	94.133.561.313,30	93,18%

B. Langkah Perbaikan

Dalam upaya peningkatan capaian kinerja Dinas Kesehatan Kota Blitar upaya yang harus dilakukan:

1. Optimalisasi standar pelayanan minimal bidang kesehatan sebagaimana Permenkes RI Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan.
2. Optimalisasi Program Indonesia Sehat dengan pendekatan keluarga berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 39 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat Dengan Pendekatan Keluarga.
3. Penguatan fasilitas pelayanan kesehatan primer mendasarkan pada Permenkes RI Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat.
4. Peningkatan upaya preventif dan promotif untuk mencapai perilaku masyarakat hidup sehat.
5. Meningkatkan koordinasi dengan sektor terkait, lembaga swadaya masyarakat peduli kesehatan, organisasi profesi, organisasi masyarakat, dan swasta dalam

peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan.

6. Percepatan penanggulangan covid-19 yang lebih optimal.

Demikian beberapa hal yang dapat kami sampaikan dalam Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Kota Blitar Tahun 2021 semoga dapat memberikan kejelasan terhadap gambaran atas pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Kesehatan Kota Blitar. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa meridhoi dan memberikan petunjuk kepada kita, sehingga kita senantiasa memiliki kekuatan dan kemampuan untuk tulus dan ikhlas bersama-sama membangun Kota Blitar dalam rangka mewujudkan visi dan misi daerah menuju peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat Kota Blitar.



**MATRIK RENCANA STRATEGIS
DINAS KESEHATAN KOTA BLITAR
TAHUN 2016 – 2021**

VISI : Masyarakat Kota Blitar Semakin Sejahtera: Religius, Cerdas, Sehat dengan Semangat Rukun Agawe Santoso

MISI : Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Keren, Berdaya Saing, Sehat Jasmani - Rohani, Cerdas, dan Berkarakter

TUJUAN							SASARAN								CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN		KET
URAIAN	INDIKATOR	FORMULA PERHITUNGAN	KONDISI AWAL		TARGET		URAIAN	INDIKATOR	FORMULA PERHITUNGAN	KONDISI AWAL		TARGET		KEBIJAKAN	PROGRAM		
			2015	2016	2017	2018				2015	2016	2017	2018				
Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat	AHH (Angka Harapan Hidup)	Angka perkiraan lama hidup rata-rata penduduk dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas menurut umur	73	73,10	73,82	74,05	Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan dan perilaku masyarakat untuk hidup sehat	Persentase Tatanan Rumah Tangga Sehat	(Jumlah rumah tangga sehat (yang diperiksa dengan penilaian 10 indikator tatanan rumah tangga sehat) / Jumlah seluruh rumah tangga yang diperiksa pada tahun yang sama) x 100%	39,29%	42,46%	56%	59%	Peningkatan kesadaran masyarakat untuk hidup sehat	1. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Serta Penyehatan Lingkungan		
	AKI (Angka Kematian Ibu per-100.000 kelahiran hidup)	(Jumlah ibu yang meninggal karena hamil, bersalin, dan nifas di suatu wilayah pada kurun waktu tertentu / Jumlah kelahiran hidup di wilayah dan pada kurun waktu yang sama) x 100.000	48,8	236,18	188,94	141,71		Indeks Kepuasan Masyarakat	Rata-rata IKM 3 UPTD Puskesmas kecamatan ((Total dari nilai persepsi per unsur / Total unsur yang terisi) x Nilai penimbang)	BAIK	BAIK	BAIK	BAIK	Penguatan pelayanan kesehatan primer (primary health care)	2. Program Peningkatan Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan		
	AKB (Angka Kematian Bayi per 1.000 kelahiran hidup)	(Jumlah bayi usia 0-11 bulan yang meninggal di suatu wilayah pada kurun waktu tertentu / Jumlah kelahiran hidup di wilayah dan pada kurun waktu yang sama) x 1.000	8,3	9,92	8,88	8,68									3. Program Pembinaan Lingkungan Sosial		

TUJUAN							SASARAN								CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN		KET
URAIAN	INDIKATOR	FORMULA PERHITUNGAN	KONDISI AWAL		TARGET		URAIAN	INDIKATOR	FORMULA PERHITUNGAN	KONDISI AWAL		TARGET		KEBIJAKAN	PROGRAM		
			2015	2016	2017	2018				2015	2016	2017	2018				
								Persentase Penca paian SPM Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Rata-rata persentase seluruh indikator pelayanan kesehatan dasar sesuai standar (pada WNI usia 15 sd. 59 th penderita hipertensi, Diabetes melitus, ODGJ berat, orang dg TB, orang beresiko terinveksi HIV)	60,17%	63,50%	100%	100%	Peningkatan penangu langan masalah kesehatan	4. Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit		
								Persentase Pencapaian SPM Kesehatan Keluarga	Rata-rata persentase seluruh indikator pelayanan kesehatan dasar sesuai standar pada ibu hamil, ibu bersalin, bayi baru lahir, balita, anak usia pendidikan dasar, lansia	83,10%	85,30%	100%	100%	Penerap an pendeka tan berkelan jutan pelayanan (<i>continuum of care</i>)	5. Peningkatan Kesehatan Keluarga dan Perbaikan Gizi Masyarakat		
								Prevalensi Balita Stunting	(Jumlah balita stunting / Jumlah seluruh balita) x 100%	-	13%	11,2%	11,1%				

TUJUAN								SASARAN								CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN		KET
URAIAN	INDIKATOR	FORMULA PERHITUNGAN	KONDISI AWAL		TARGET			URAIAN	INDIKATOR	FORMULA PERHITUNGAN	KONDISI AWAL		TARGET			KEBIJAKAN	PROGRAM	
			2017	2018	2019	2020	2021				2017	2018	2019	2020	2021			
Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat	AHH (Angka Harapan Hidup)	Angka perkiraan lama hidup rata-rata penduduk dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas menurut umur	73,17	73,36	74,3	74,5	74,7	Meningkatnya akses pelayanan kesehatan	Indeks Keluarga Sehat (IKS) Kota Blitar	(Jumlah total capaian kelompok indikator dibagi Jumlah kelompok indikator (keluarga mengikuti program KB, ibu melakukan persalinan di fasilitas kesehatan, bayi mendapat imunisasi dasar lengkap, bayi mendapat ASI eksklusif selama 6 bulan, Balita mendapatkan pemantauan pertumbuhan, penderita TB paru mendapatkan pengobatan sesuai standar, penderita hipertensi melakukan pengobatan secara teratur, penderita gangguan jiwa mendapatkan pengobatan dan tidak ditelantarkan, anggota keluarga tidak ada yang merokok, keluarga mempunyai akses/memiliki sarana air bersih, keluarga mempunyai akses/menggunakan jamban sehat, keluarga sudah menjadi anggota JKN)	-	-	0,696 (skala)	0,70 (skala)	0,71 (skala)	Peningkatan jaminan akses pelayanan kesehatan melalui program-program kesehatan di fasilitas pelayanan	1. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	
								Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan kesehatan	Rata-rata IKM 3 UPTD Puskesmas kecamatan ((Total dari nilai persepsi per unsur / Total unsur yang terisi) x Nilai penimbang)	BAIK	BAIK	BAIK	BAIK	BAIK	Peningkatan pelayanan kesehatan dengan optimalisasi kualitas sumber daya kesehatan sesuai standar	1. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat 2. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia	

TUJUAN								SASARAN								CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN		KET
URAIAN	INDIKATOR	FORMULA PERHITUNGAN	KONDISI AWAL		TARGET			URAIAN	INDIKATOR	FORMULA PERHITUNGAN	KONDISI AWAL		TARGET			KEBIJAKAN	PROGRAM	
			2017	2018	2019	2020	2021				2017	2018	2019	2020	2021			
																3. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman		
									Angka Kematian Ibu (AKI) per-100.000 kelahiran hidup	(Jumlah ibu yang meninggal karena hamil, bersalin, dan nifas di suatu wilayah pada kurun waktu tertentu dibagi Jumlah kelahiran hidup di wilayah dan pada kurun waktu yang sama) x100.000	0	254,71	141,71	141,71	94,50	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan ibu melalui pemberdayaan masyarakat dalam penurunan AKI	1. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	
									Angka Kematian Bayi (AKB) per-1.000 kelahiran hidup	(Jumlah bayi usia 0-11 bulan yang meninggal di suatu wilayah pada kurun waktu tertentu dibagi Jumlah kelahiran hidup di wilayah dan pada kurun waktu yang sama) x1.000	10,91	13,75	8,48	8,28	8,08	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan ibu dan anak melalui pemberdayaan masyarakat dalam penurunan AKB	1. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	
									Prevalensi Balita Stunting	(Jumlah balita stunting / Jumlah seluruh balita) x 100%	15,53	9,54	10,5	10	10	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan ibu dan anak melalui pemberdayaan masyarakat dalam penurunan Prevalensi stunting	1. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	

Putar, 3 Februari 2022
 Kepala Dinas Kesehatan Kota Putar

 dr. DEBORA S. SHUJAN, M.MKes.
 NIP. 19600305 201112 1 003

RENCANA KINERJA TAHUN 2021
DINAS KESEHATAN KOTA BLITAR

SASARAN			PROGRAM			KEGIATAN				Ket.
Uraian	Indikator Sasaran	Target	Uraian	Indikator Program	Target	Uraian	Indikator Kegiatan	Target	Anggaran	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Meningkatnya akses pelayanan kesehatan	Indeks Keluarga Sehat (IKS) Kota Blitar	0.71 (skala)	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase kelurahan siaga aktif Purnama dan Mandiri	90,48%	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah UKBM yang dibina	7 kelompok sasaran	2.284.958.000,00	
							Persentase kridha saka bakti husada yang terbentuk	50%		
							Persentase posyandu aktif strata purnama mandiri	98%		
						Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase posyandu strata purnama mandiri yang menjadi taman posyandu	50%	105.435.900,00	
2. Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan kesehatan	BAIK	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Puskesmas yang terakreditasi	100%	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase sarana prasarana pelayanan kesehatan yang terpenuhi	100%	8.213.160.657,00	
							Jumlah sarana prasarana fasilitas pelayanan kesehatan yang terpelihara	2 jenis sarana		
							Persentase obat dan vaksin di Puskesmas yang tersedia	100%		
							Persentase Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) yang tersedia	95%		

SASARAN			PROGRAM			KEGIATAN				Ket.
Uraian	Indikator Sasaran	Target	Uraian	Indikator Program	Target	Uraian	Indikator Kegiatan	Target	Anggaran	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							Persentase persediaan kesehatan yang tersedia	93%		
						Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas pelayanan kesehatan (Fasyankes) primer/Puskesmas yang termonev akreditasinya	3 Puskesmas	56.841.382.881,00	
							Jumlah Puskesmas yang terbina	3 Puskesmas		
							Angka kontak peserta JKN	150 ‰		
							Persentase masyarakat miskin Kota Blitar yang mendapat pelayanan kesehatan	100%		
							Cakupan jaminan pembiayaan pelayanan kesehatan	97%		
							Jumlah sampel yang diperiksa	1.450 sampel		
							Jumlah fasilitasi kegiatan penilaian Kota Sehat	8 fasilitasi		
							Jumlah kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Berbasis Masyarakat (STBM)	21 kelurahan		
							Jumlah fasyankes yang melakukan pengelolaan limbah medis sesuai standar	8 Fasyankes		
							Persentase TTU yang memenuhi syarat	85%		

SASARAN			PROGRAM			KEGIATAN				Ket.
Uraian	Indikator Sasaran	Target	Uraian	Indikator Program	Target	Uraian	Indikator Kegiatan	Target	Anggaran	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							Jumlah Pos UKK yang terbentuk	6 Pos UKK		
					Jumlah sarana pembinaan upaya kesehatan olahraga		4 kelompok OR			
					Persentase warga negara usia 60 tahun keatas mendapatkan screening kesehatan		100%			
					Jumlah promosi kesehatan		4 macam			
					Persentase warga negara usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100%	Cakupan diare yang ditangani	100%		
					Release From Treatment (RFT) penderita kusta	95%				
					Cakupan penemuan penderita pneumonia balita	100%				
					Persentase Puskesmas melakukan deteksi dini Hepatitis B pada kelompok berisiko	100%				
					Incident Rate (IR) Demam Berdarah Dengue	<49 per-100.000 jml. Penduduk				
					Angka kejadian malaria/Annual Parasite Incidence (API)	<1 per-1.000 jml penduduk berisiko				
					Persentase orang dengan TB mendapatkan pelayanan TB sesuai standar	100%				

SASARAN			PROGRAM			KEGIATAN				Ket.
Uraian	Indikator Sasaran	Target	Uraian	Indikator Program	Target	Uraian	Indikator Kegiatan	Target	Anggaran	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							Persentase orang beresiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan sesuai standar	100%		
							Persentase penderita hipertensi mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	100%		
							Persentase penyandang Diabetes Melitus/DM yang mendapat pelayanan sesuai standar	100%		
							Persentase orang dengan gangguan Jiwa (OGDJ) berat yang mendapat layanan kesehatan	100%		
							Persentase Institusi yang melaksanakan kawasan tanpa rokok (KTR)	55%		
							Persentase kelurahan yang melaksanakan Posbindu PTM	57%		
				Persentase kelurahan UCI (<i>Universal Child Immunization</i>)	90%		Cakupan bayi yang mendapat imunisasi dasar lengkap (IDL)	94%		
				Persentase KLB Kelurahan yang ditangani < 24 jam	100%		Jumlah macam fasilitasi Surveillance epidemiologi dan penanggulangan wabah	4 macam		

SASARAN			PROGRAM			KEGIATAN				Ket.
Uraian	Indikator Sasaran	Target	Uraian	Indikator Program	Target	Uraian	Indikator Kegiatan	Target	Anggaran	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							Persentase Pemeriksaan kesehatan CJH	100%		
							Jumlah Kejadian berpotensi wabah yang ditangani	9.704 kejadian		
						Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	Jumlah Sistem informasi perencanaan dan pelaporan yang tersedia	1 sistem	67.527.600,00	
						Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas pelayanan kesehatan yang dibina	6 RS	79.591.500,00	
							Persentase kasus gawat darurat yang mendapat pelayanan	100%		
			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase Puskesmas yang terakreditasi	100%	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	Persentase tenaga kesehatan berizin yang dibina	100%	3.600.000,00	
						Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Persentase tenaga kesehatan berizin yang dibina	100%	649.622.100,00	
						Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah tenaga kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya	17 nakes	196.639.900,00	

SASARAN			PROGRAM			KEGIATAN				Ket.
Uraian	Indikator Sasaran	Target	Uraian	Indikator Program	Target	Uraian	Indikator Kegiatan	Target	Anggaran	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase puskesmas yang terakreditasi	100%	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kefarmasian (Fasyanfar) yang dibina	20 Fasyanfar	120.120.200,00	
						Persentase fasyankes berizin yang dibina	100%			
				Persentase kelurahan siaga aktif Purnama dan Mandiri	90,48%	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Persentase Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) yang memenuhi syarat kesehatan	85%	110.679.400,00	
						Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	Persentase Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) yang memenuhi syarat kesehatan	85%	84.705.300,00	
				Angka Kematian Ibu (AKI)	94,50 per-100.000 kelahiran hidup	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Ibu Hamil mendapatkan pelayanan ibu hamil	100%	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan K1
Persentase Bumil KEK mendapat PMT pemulihan	100%									
Persentase Pelayanan Kesehatan Ibu bersalin	100%									
Persentase pelayanan nifas	100%									

SASARAN			PROGRAM			KEGIATAN				Ket.
Uraian	Indikator Sasaran	Target	Uraian	Indikator Program	Target	Uraian	Indikator Kegiatan	Target	Anggaran	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan screening kesehatan sesuai standar	100%		
	Angka Kematian Bayi (AKB)	8,58 per-1.000 kelahiran hidup	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Angka Kematian Balita (AKABAL)	8,7 per-1.000 kelahiran hidup	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase bayi baru lahir mendapat layanan kesehatan (SPM)	100%	38.440.000,00	
							Persentase anak usia 0-59 bulan mendapatkan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	100%		
	Prevalensi Balita Stunting	10%	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Prevalensi gizi buruk pada balita	0,1%	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase bayi mendapat ASI Eksklusif	77%	203.636.400,00	
Jumlah Total Pagu Anggaran									101.021.731.210,00	

**PERNYATAAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS KESEHATAN KOTA BLITAR**

KOTA BLITAR



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **dr. DHARMA SETIAWAN, M.MKes.**

Jabatan : **Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kota Blitar**

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Drs. SANTOSO, M.Pd.**

Jabatan : **Walikota Blitar**

selaku atasan langsung pihak pertama, selajutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Blitar, 28 Oktober 2021


Walikota Blitar,
Drs. SANTOSO, M.Pd


Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kota Blitar,
dr. DHARMA SETIAWAN, M.MKes.

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
DINAS KESEHATAN KOTA BLITAR

No.	Kinerja Utama/Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya akses pelayanan kesehatan	Indeks Keluarga Sehat (IKS) Kota Blitar	0,71 (Skala)
2.	Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan Kesehatan	BAIK
		Angka Kematian Ibu (AKI)	94,50 per-100.000 kelahiran hidup
		Angka Kematian Bayi (AKB)	8,08 per-1.000 kelahiran hidup
		Prevalensi Balita Stunting	10%

Program	Anggaran (Rp.)	Keterangan
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	31.761.909.542,00	APBD
2. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	65.704.060.868,00	APBD
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	849.862.000,00	APBD
4. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	315.504.900,00	APBD
5. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	2.390.393.900,00	APBD
Jumlah Anggaran	101.021.731.210,00	

Blitar, 28 Oktober 2021

Walikota Blitar,



Drs. SANTOSO, M.Pd

Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kota Blitar,



dr. DHARMA SETIAWAN, M.MKes.

**PENGUKURAN KINERJA
PERANGKAT DAERAH**

Perangkat Daerah : Dinas Kesehatan Kota Blitar
Tahun : 2021

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	FORMULASI PERHITUNGAN	TARGET	REALISASI	%	KET	PROGRAM	PAGU Rp.	REALISASI Rp.	%	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.	Meningkatnya akses pelayanan kesehatan	Indeks Keluarga Sehat (IKS) Kota Blitar	Jumlah total capaian kelompok indikator dibagi Jumlah kelompok indikator (keluarga mengikuti program KB, ibu melakukan persalinan di fasilitas kesehatan, bayi mendapat imunisasi dasar lengkap, bayi mendapat ASI eksklusif selama 6 bulan, Balita mendapatkan pemantauan pertumbuhan, penderita TB paru mendapatkan pengobatan sesuai standar, penderita hipertensi melakukan pengobatan secara teratur, penderita gangguan jiwa mendapatkan pengobatan dan tidak ditelantarkan, anggota keluarga tidak ada yang merokok, keluarga mempunyai akses/memiliki sarana	0,71 (skala)	0,28 (skala)	39,44		Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	2.390.393.900,00	2.325.009.400,00	97,26	

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	FORMULASI PERHITUNGAN	TARGET	REALISASI	%	KET	PROGRAM	PAGU Rp.	REALISASI Rp.	%	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			air bersih, keluarga mempunyai akses/menggunakan jamban sehat, keluarga sudah menjadi anggota JKN									
2.	Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan kesehatan	Rata-rata IKM 3 UPT Puskesmas (Total dari nilai persepsi per unsur dibagi total unsur yang terisi dikali Nilai penimbang)	BAIK	BAIK	100		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	65.201.662.638,00	60.852.780.473,76	93,33%	
								Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia	849.862.000,00	689.069.400,00	81,08%	
								Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	315.504.900,00	233.601.225,00	74,04%	
		Angka Kematian Ibu (AKI) per-100.000 kelahiran hidup	Jumlah ibu yang meninggal karena hamil, bersalin, dan nifas di suatu wilayah pada kurun waktu tertentu dibagi Jumlah kelahiran hidup di wilayah dan pada kurun waktu yang sama dikali 100.000	94,50 per-100.000 kelahiran hidup	889,59 per-100.000 kelahiran hidup	(-650)		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	260.321.830,00	236.433.200,00	90,82%	

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	FORMULASI PERHITUNGAN	TARGET	REALISASI	%	KET	PROGRAM	PAGU Rp.	REALISASI Rp.	%	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		Angka Kematian Bayi (AKB) per-1.000 kelahiran hidup	Jumlah bayi usia 0-11 bulan yang meninggal di suatu wilayah pada kurun waktu tertentu dibagi Jumlah kelahiran hidup di wilayah dan pada kurun waktu yang sama dikali 1.000	8,08 per-1.000 kelahiran hidup	5,76 per-1.000 kelahiran hidup	128,71		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	38.440.000,00	33.840.000,00	88,03%	
		Prevalensi Balita Stunting	Jumlah balita stunting dibagi Jumlah seluruh balita dikali 100%	10%	5,28%	147,2		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	203.636.400,00	194.938.100,00	95,73%	

Blitar, 3 Januari 2022

KEPALA DINAS KESEHATAN
KOTA BLITAR



dr. DHARMA SETIAWAN, M.MKes.

NIR. 19680305 200112 1 003